

BAB I
PEMAHAMAN UMUM MENGENAI KEKERASAN
DAN PENGGUNAAN KEKERASAN

1.1. Pandangan-Pandangan Umum

A. Thomas Hobbes (1588-1679)

Pendapat Hobbes tentang kekerasan dapat kita tempatkan dalam kerangka pandangannya mengenai kekuasaan politik dalam bagian dari karyanya yang termasyur *Leviathan*. Secara khusus hal tersebut dibicarakan dalam konteks tentang kedaulatan pemerintahan negara dan peranan rakyat sipil dalam relasi yang bersifat monologis absolut.

Kekerasan - menurut Hobbes - merupakan keadaan yang alamiah dari manusia (state of nature) dengan anggapan dasarnya tentang manusia sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkistis, dan egoistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, serta buas.

Manusia secara naluri dianggap cenderung untuk selalu mempertahankan diri dan kebebasannya sendiri, yang kemudian mendorongnya untuk menguasai orang lain. Akibatnya, manusia saling memangsa dan menghancurkan, yang dikenal dengan *homo homini lupus* (manusia sebagai serigala bagi sesamanya) dan ada pada suatu keadaan

dimana semua berperang melawan semua (*belum omnium contra omnes*). Dalam tahapan ini, kekuatan dan kecuranganlah yang menjadi kebajikan pokok satu-satunya.

Untuk menghindarkan diri dari bahaya kehancuran akibat situasi tersebut, maka pengalaman menunjukkan bahwa akal sehat (*common sense*) menuntut agar setiap orang mau melepaskan haknya dari berbuat semaunya. Kemudian bersama-sama bersatu untuk membuat suatu ikatan perjanjian bahwa mereka akan membentuk serta tunduk pada suatu pemerintah pusat.¹

Hobbes menyetujui bahwa ikatan perjanjian yang asali pada hakekatnya adalah satu, dibuat oleh individu-individu secara keseluruhan untuk membentuk pemerintahan negara, dimana pemerintah sama sekali tidak turut serta dalam perjanjian tersebut. Ia juga menyetujui bahwa rakyat merupakan sumber tertinggi dari semua otoritas, namun menganggap mereka telah memindahkan dan mendelegasikan kedaulatan serta kuasanya, seluruhnya dan untuk seterusnya kepada pemerintah melalui ikatan perjanjian yang mereka buat.

1.

Dr. Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-11, 1995), h.34-35.

Segera sesudah pemerintahan negara terbentuk, pemerintah menjadi kekuasaan tertinggi dan berakhirlah segala hak para warga negara. Yang kini ada adalah ketaatan yang bersifat pasif dan mutlak, terlepas apakah pemerintahan tersebut baik atau buruk. Karena itu warga negara tidak berhak untuk memberontak sebab telah terikat kepada perjanjian, sedang kuasa yang memerintah tidaklah terikat, karena pemerintah tidak membuat perjanjian tersebut.

Because the right of bearing the person of them all is given to him they make sovereign, by covenant only of one to another, and not of him to any of them, there can happen no breach of covenant on the part of the sovereign; and consequently none of his subjects, by any pretence of forfeiture, can be freed from his subjection.²

Dengan pandangannya itu, Hobbes bukan saja telah menjadikan negara sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak yang tidak terikat kepada para warganya, namun juga sebagai otoritas yang berhak untuk memaksakan segala hak-haknya atas setiap individu. Inilah yang dimaksud sebagai corak hubungan yang bersifat monologis absolut. Sehingga, G.D.H. Cole menyebutkan bahwa teori Hobbes tersebut bukan hanya merupakan satu bentuk

2.

Thomas Hobbes, *Leviathan* (Chicago: Encyclopedia Britannica Inc., Great Books of Western World Series, chapter XVIII - of Commonwealth - of the Rights of Sovereigns by Institution, 1952), h.101

statisme (etatisme), namun pada hakekatnya merupakan despotisme murni.³

Pandangan Hobbes di atas tidak dapat dilepaskan dari latar belakang situasi yang dialaminya ketika itu saat dimana perang saudara sedang berkecamuk dengan hebatnya di Inggris. Hal ini membuatnya beranggapan bahwa pemerintahan yang terburuk sekalipun masih lebih baik ketimbang anarki, dan karena itu ia berupaya menemukan argumen-argumen untuk melegitimasi setiap bentuk absolutisme pemerintahan negara.

Dalam keadaan serta kondisi merajalelanya anarki, hanya pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuasaanlah yang dapat mengatasinya.⁴ Sehingga penggunaan kekerasan dalam hal ini, khususnya oleh negara, dipandang secara positif oleh Hobbes. Kekuasaan dan kekerasan diperlukan untuk mengatasi keadaan alamiah manusia yang dipandang negatif demi tercapainya tatanan masyarakat yang tertib dan aman.

3.

Lih. G.D.H. Cole dalam komentar bagian introduksi dari karya Rousseau, *The Social Contract And Discourses* (London: Dent & Sons Ltd., Everyman's Library, 1958), h.xv

4.

I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.63

B. Nicolo Machiavelli (1469-1527)

Perbedaan antara Hobbes dan Machiavelli dapat dirumuskan secara sederhana. Pemikiran Hobbes lebih berhubungan dengan "*what power is*" secara legitimasi hukum, sedangkan Machiavelli lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap "*what power does*" secara strategis.⁵

Pembedaan ini dikemukakan dalam upaya untuk menangkap perbedaan latar belakang antara Hobbes sebagai seorang legislator yang mengabdikan pada pemerintahan Charles II yang seluruh pandangannya berimplikasi pada kekuasaan negara, dengan Machiavelli yang telah berada di luar posisi dan struktur kekuasaan pemerintahan Florence ketika ia menuliskan karyanya yang termasyur, *The Prince*.⁶

Perhatian utama Machiavelli tertuju pada bagaimana suatu kekuasaan dapat tetap dipertahankan melalui pertimbangan dan pemikiran yang strategis dari seorang penguasa (*The Prince*). Sehingga fokusnya ada

5.

Stewart R. Clegg, *Frameworks of Power* (London: Sage Publications, 1989), h.5

6.

Keterangan mengenai *biographical note* dari Machiavelli dan Hobbes, lih. Machiavelli & Hobbes, *Op. Cit.*, h.ix-x, 41-42

pada strategi dan intrik politik, perjanjian, persetujuan, negosiasi, penipuan, kelicikan, dan konflik kekerasan sebagai sarana-sarana yang dapat dipergunakan untuk mengamankan kekuasaan.

Dalam membuat konstruksi bagi nilai-nilai tertinggi (ultimate values), Machiavelli menghindari isu-isu etis, sebab baginya kekuasaan bukan dilihat dari sisi ideal secara hukum tetapi murni sebagai suatu tindakan, cara, dan strategi yang berguna bagi pencapaian suatu tujuan. Dalam konteks inilah kekerasan dan penggunaannya dinilai, yaitu sepenuhnya tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan kekerasan dinilai sejauh efektifitasnya bagi pencapaian sasaran yang dituju, tidak ada ukuran moralitas baik atau buruk.

Bagi Machiavelli, kekuasaan dengan segala implikasinya tidak dimiliki oleh seseorang secara inheren dan otomatis, melainkan dicapai, dibangun dan dihasilkan melalui kompetensi strategi dari para pelakunya yang akan membuatnya berkuasa. Inti dari kekuasaan dalam pemikiran Machiavelli tidak terlepas dari penggunaan kekerasan. Sebab untuk menjadi efektif, sebuah strategi harus mengetahui kapan perlu berlaku keras dan kejam, dan kapan harus berlaku lunak. Stewart Clegg mengomentari bagian ini dengan menyebutkan :

It must be practise an economy of violence, sparingly, approapriately and creatively. An efective economy of violence requires careful

*consideration of its military forms, knowledge of the means required to translate armed bodies into disciplined organized power. On some occasions, at least, violence may be judged more effective.*⁷

Meskipun demikian, Machiavelli menyatakan bahwa prinsip-prinsipnya - meskipun dalam ukuran tertentu memiliki fungsi aplikasi universal - tidak dapat digeneralisasikan begitu saja dalam setiap lapangan tindakan. Setiap bentuk kehidupan dipandang memiliki corak/pola, rasionalitas dan fluktuasinya sendiri-sendiri yang khas. Strategi kekuasaan yang efektif untuk satu keadaan dapat menjadi defektif sama sekali pada bentuk keadaan dan konteks kehidupan lain yang berbeda.⁸

C. Karl Marx (1818-1883)

Pandangan Marx tentang kekerasan dan penggunaannya harus kita lihat dalam anjurannya bagi revolusi sosial dari kaum proletar terhadap kaum kapitalis sebagai pemilik modal dan sarana-sarana produksi. Di sini, penggunaan kekerasan dilihat sebagai instrumen perjuangan yang paling ampuh untuk meniadakan perbedaan kelas-kelas sosial dalam masyarakat kapitalis yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan penderitaan kaum buruh/proletar.

7. Stewart R. Clegg., *Op. Cit.*, h.33

8. *Ibid.*, h.33-34

Bagi Marx, sejarah umat manusia dilihat sebagai suatu proses perjalanan dan perkembangan tahapan-tahapan kehidupan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.⁹ Kedamaian dan keharmonisan masyarakat manusia pada akhirnya akan tercapai melalui sejarah perang dan revolusi kekerasan.

Latar belakang pengalaman Marx yang menyaksikan kesengsaraan dan penderitaan buruh-buruh industri di kota-kota Eropa yang sedang bertumbuh pesat pada waktu itu membuatnya berkesimpulan bahwa kemiskinan yang tidak manusiawi tersebut diakibatkan oleh penguasaan sarana-sarana produksi secara pribadi oleh mereka yang memiliki modal.

Pada akhirnya semua itu mengakibatkan terjadinya penimbunan kapital pada pihak pemilik modal, namun terjadi pengurangan tenaga dan hak pada kaum proletar.¹⁰ Karena ketatnya persaingan dan pesatnya mekanisasi, maka semakin murahlah upah tenaga kerja dan semakin tinggilah angka pengangguran. Terjadi jurang yang semakin lebar antara kaum kapitalis dan proletar. Krisis ini segera diikuti oleh menurunnya daya beli masyarakat, padahal produksi barang-barang justru semakin meningkat.

9.

Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-1, 1994), h.134

10.

Harun Hadiwijono, *Op. Cit.*, h.123

Konsekuensinya barang-barang tidak dikonsumsi, pabrik-pabrik tidak dapat memproduksi karena tingkat permintaan tidak lagi sesuai dengan daya beli. Kapital tidak dapat berjalan dan menjadi barang mati. Ini akan mengakibatkan lumpuhnya sarana-sarana produksi yang dibarengi oleh semakin tingginya tingkat kebutuhan yang tercipta dalam masyarakat, terutama kelas bawah.

Marx menganalisis bahwa keadaan ini pada akhirnya akan mengakibatkan keruntuhan masyarakat kapitalis. Pada saat inilah kaum proletar harus bangkit bersatu untuk merebut penguasaan sarana-sarana produksi kaum kapitalis, dan menjadikannya milik bersama melalui suatu revolusi kekerasan yang bersifat sosial.

Melalui revolusi, bentrokan kepentingan-kepentingan ekonomis akan berakhir dan akan melahirkan suatu bentuk masyarakat tanpa kelas, bebas konflik dan kreatif yang disebut komunisme.¹¹ Perebutan dengan kekerasan atas sarana-sarana produksi yang menjadi hak milik pribadi akan membuka jalan menuju suatu kehidupan sejati yang bebas, membahagiakan dan penuh persaudaraan bagi semua masyarakat manusia.

Tulisan Marx mengenai peranan konflik dan kekerasan mempunyai kemiripan dengan Hobbes, namun Marx melihatnya lebih sebagai bentrokan antar kelompok

11.

Tom Campbell, *Op. Cit.*, h.134

(kelas-kelas sosial) ketimbang antara individu dengan individu.¹² Perbedaannya, Marx tidak menyetujui bahwa kekerasan merupakan ciri keadaan manusia secara alamiah (egois, anarkis, buas dan rakus). Ciri-ciri tersebut dianggap tidak hadir secara intrinsik dan otomatis melainkan secara potensial, tergantung pada hubungan-hubungan ekonomis dan sosial dimana ia hidup dan berada.

D. Sigmund Freud (1856-1939)

Sebagai seorang neurologist sekaligus penemu metode terapi psikoanalisis yang membuatnya kemudian menjadi sangat termasyur, Freud merupakan orang pertama yang mengembangkan teori psikologi tentang struktur kepribadian manusia. Menurutnya, kepribadian dibangun oleh tiga sistem pokok yaitu id, ego, dan superego. Masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dinamisme dan mekanisme sendiri, namun saling berinteraksi dengan sangat erat sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh ketiga sistem tersebut dari tingkah laku manusia.¹³

Dalam teorinya, Freud sangat menekankan pengaruh alam bawah sadar terhadap tingkah laku manusia.

12.

Ibid., h.135

13.

Untuk pembahasan lebih rinci mengenai sistem kepribadian ini, lih. Samuel Gladding, *Counseling - A Comprehensive Profession* (New York: Macmillan Publishing Company, 1992), h.58-60

kekerasan, agresivitas, dan impuls-impuls destruktif dimengerti sebagai bagian dari instink bawah sadar manusia yang bersifat tidak rasional yang termasuk dalam Id. Secara keseluruhan, Id dapat dianggap sebagai komponen biologis dari kepribadian yang senantiasa menuntut pemuasan.

Sekalipun id sendiri tidak dinilai negatif dalam pandangan Freud, dan tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan sistem lainnya, kita dapat menyimpulkan bahwa potensi kekerasan dan dorongan terhadap penggunaan kekerasan merupakan bagian yang melekat dalam diri setiap orang, terlepas apakah kekerasan tersebut kemudian diwujudkan/dimanifestasikan keluar atau tidak.

Dalam analisis selanjutnya, Freud beranggapan bahwa timbulnya kekerasan dan agresivitas juga dapat disebabkan oleh apa yang terjadi pada tahap-tahap perkembangan psikoseksual¹⁴ seseorang dalam rangka perkembangan kepribadian secara utuh. Misalnya seorang anak pada tahap phalik (tahapan munculnya perasaan-perasaan seksual yang agresif berkaitan dengan mulai berfungsinya organ-organ genital) mulai dapat merasakan kenikmatan masturbasi dan fantasi yang akan membuka

14.

Freud membagi perkembangan psikoseksual seseorang menjadi 4 tahap : oral, anal, phalik, genital.

jalan bagi munculnya gejala *oedipus kompleks*.¹⁵

Gejala perkembangan yang dipandang alami ini membuat seorang anak akan mengembangkan sikap konflik terhadap orang tua yang memiliki kesamaan gender dengannya. Selain daripada itu, kekerasan juga dipandang dapat muncul sebagai hal yang normal dari mekanisme pertahanan diri (yang dianggap beroperasi pada wilayah tidak sadar) terhadap situasi-situasi yang dihadapi seseorang.

Misalnya *Reaction Formation* yaitu mekanisme yang dengannya segala pikiran, perasaan, atau dorongan yang terbentuk dari kecemasan ditekan begitu rupa dan sebagai hasilnya muncul hal yang sebaliknya. Contoh: seorang ayah yang memukul anaknya sebagai hukuman karena merasa sayang dan takut kehilangan anaknya. Atau *Displacement*, mekanisme yang dengannya energi disalurkan kepada objek lain yang dianggap aman sebagai alternatif dari objek lain yang dirasa tidak aman. Misalnya seorang yang baru saja mengalami tekanan di kantor begitu tiba di rumah langsung menendang anjingnya.

Kesimpulan yang dapat kita tarik ialah bahwa kekerasan menurut Freud (moralitas tidaklah menjadi isu

15.

Istilah *oedipus kompleks* diambil dari nama raja Thebes yang membunuh ayahnya dan mengawini ibunya. Rumusan singkat dari istilah ini adalah hasrat seksual terhadap orang tua yang berlainan jenis dan hasrat permusuhan terhadap orang tua sejenis.

yang dibicarakan pada konteks ini) adalah sesuatu yang ada secara alami pada diri setiap orang, apakah itu merupakan satu bagian dari Id, atau bagian dari tahap perkembangan psikoseksual seseorang, atau merupakan bagian dari mekanisme pertahanan diri.

E. Johan Galtung (1930-)

Johan Galtung (masih hidup) merupakan seorang sosiolog kelahiran Norwegia yang dianggap sebagai seorang pelopor studi tentang masalah-masalah konflik dan perdamaian, yang kemudian mengembangkannya menjadi satu disiplin ilmu baru yaitu *polemologi* - ilmu yang mempelajari sebab-musabab sengketa dan penyelesaiannya, serta masalah perdamaian dan syarat-syarat pemeliharannya.¹⁶

Dapat dikatakan pandangan Galtung tentang kekerasan dan penggunaannya memiliki cakupan dimensi yang sangat luas tetapi juga lebih spesifik dibandingkan dengan pendapat para tokoh yang telah disinggung sebelumnya. Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.¹⁷

16.

Lih. bagian Prawacana buku karya I. Marsana Windhu, *Op. Cit.*, h.v

17.

Ibid., h.64

Yang dimaksud dengan realisasi aktual adalah apa yang terjadi secara nyata, sedangkan realisasi potensial adalah apa yang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya, sarana-prasarana, dan tingkat kemajuan yang sudah dicapai pada jamannya. Dengan kata lain, bila apa yang potensial lebih tinggi dari apa yang aktual, di situ terjadi kekerasan. Jadi kekerasan dirumuskan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual.¹⁸

Dicontohkan, orang yang meninggal karena menderita TBC pada abad 18 tidak dikategorikan mengalami kekerasan. Tetapi jika hal itu terjadi di abad 21 dimana ilmu kedokteran dan sarana pengobatan sudah demikian canggih namun ada orang yang dibiarkan, ditelantarkan dan tidak diberikan pengobatan, di situ terjadi kekerasan. Singkatnya, segala sesuatu (keadaan, peristiwa) yang seharusnya bisa diatasi dan ditanggulangi tetapi dibiarkan terjadi, maka di situ ada kekerasan.

Dari hal tersebut jelaslah bahwa Galtung mendefinisikan kekerasan dengan amat luas. Ia menolak konsep pemahaman yang sempit dari kekerasan yang hanya mengacu pada serangan terhadap kemampuan somatis seseorang, dimana pembunuhan merupakan perwujudan

18.

Loc. Cit.

ekstremnya. Menurutnya, jika hanya itu yang diartikan sebagai kekerasan, dan perdamaian dianggap sebagai bentuk pengingkarnya, maka terlalu sedikit yang ditolak dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian secara ideal.¹⁹ Artinya, kekerasan non-material seperti iklim monologis otoriter yang tertutup terhadap kebebasan berbeda pendapat masih dapat dianggap sejalan dengan perdamaian.

Jadi pemahaman Galtung terhadap kekerasan lebih dilihat dari sudut pandang korban dan pengaruh yang diakibatkan olehnya. Sehingga dari perspektif ini tidak banyak bedanya apakah seseorang mati secara perlahan-lahan karena kekurangan makan atau seketika karena ditembak. Dalam pemahaman selanjutnya, Galtung membuat enam pembedaan terhadap dimensi -dimensi kekerasan yaitu²⁰

1. Kekerasan fisik dan psikologis.

Galtung memakai istilah *hit* dan *hurt* untuk mengungkapkan sisi ganda dari hal ini. Yang pertama lebih kepada tindakan yang menyakiti, atau bahkan menghilangkan sama sekali daya fungsi jasmani seseorang. Sedangkan istilah kedua lebih kepada tindakan yang mengakibatkan

19.

I. Marsana Windhu, *Ibid.*, h.65

20.

Enam pembedaan ini diambil dari tulisan Marsana Windhu tentang Galtung dalam buku yang sama.

tereduksinya kemampuan atau terganggunya fungsi mental seseorang, misalnya : penyiksaan dalam proses interogasi selain berakibat pada tubuh, juga berdampak pada kestabilan mental seseorang.

2. Pengaruh positif dan negatif

Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (reward oriented) dalam mengarahkan perilaku seseorang yang dianggapnya cenderung manipulatif, membuat seseorang sebenarnya tidak bebas karena "dikendalikan" oleh sistem, meskipun di sisi lain memberikan kenikmatan dan *euphoria* (perasaan antusiasme dan semangat yang berlebih-lebihan tanpa dasar kebenaran dan realitas). Bagian ini hanya ingin menunjukkan tentang pentingnya memahami kekerasan secara luas.

3. Ada objek atau tanpa objek manusia

Galtung menyebutkan bahwa kekerasan juga dapat dikategorikan dalam tindakan yang tidak secara langsung dialami oleh manusia. Misalnya penghancuran benda yang dikategorikan Galtung sebagai kekerasan tidak sempurna. Meskipun tidak ada korban manusia, namun di situ tetap ada kekerasan secara psikologis. Apalagi jika benda tersebut ada yang memiliki, itu sama artinya dengan menghina dan menyerang si pemilik benda secara tidak langsung.

4. Ada subjek atau tanpa subjek manusia

Sebuah kekerasan disebut mempunyai subjek jika ada pelakunya (manusia) secara konkrit. Sedangkan kekerasan

tanpa subjek adalah jika pelakunya tidak dapat ditemukan secara konkrit atau merupakan suatu struktur yang impersonal. Misalnya, sistem birokrasi yang cenderung mempersulit dan bukan mempermudah kelancaran kegiatan-kegiatan usaha masyarakat.

5. Disengaja atau tidak disengaja

Galtung beranggapan bahwa pemahaman yang hanya menekankan unsur kesengajaan sebagai dasar bagi penilaian etis terhadap suatu tindakan tidak cukup untuk melihat dan mengatasi kekerasan struktural yang bekerja dengan halus dan tidak disengaja. Karena Galtung menitikberatkan pada segi akibat yang dirasakan, maka sengaja atau tidak, kekerasan tetap harus dipandang sebagai kekerasan.

6. Yang tampak dan tersembunyi

Pembedaan yang terakhir dilihat dari apa yang dapat disaksikan (*manifest*) dan dirasakan secara langsung dan nyata, dengan apa yang masih merupakan potensi yang tersembunyi (*latent*) yang sewaktu-waktu dapat meledak. Misalnya, sentimen rasial, suku, atau agama yang akhirnya meledak dalam bentuk kerusuhan dan pembunuhan-pembunuhan secara massal seperti yang terjadi di bekas negara Yugoslavia, Afrika Selatan, India, Kalimantan, dan banyak lagi.

1.2. Anatomi Kekerasan

A. Aspek Psikoneurologis

Dalam bentuknya yang tipikal dan sederhana, kekerasan merupakan sebuah erupsi dari kemarahan atau nafsu yang terpendam.²¹ Ketika seseorang atau sekelompok orang mengalami tekanan dan penolakan selama beberapa waktu atas apa yang dia rasakan sebagai haknya yang sah, namun di saat yang bersamaan terus-menerus dibebani oleh perasaan tidak berdaya yang semakin mengikis penilaian dan penghargaan terhadap dirinya sendiri (self-esteem), maka dapat diprediksikan bahwa sebagai hasil akhirnya akan muncul kekerasan.

Dapat dikatakan bahwa bagian besar dari kekerasan terjadi sebagai peristiwa yang bersifat fisik (physical event). Namun peristiwa fisik ini juga mengambil tempat dalam konteks psikologis, yaitu apakah impuls dari suatu stimulus untuk melakukan kekerasan datang secara tiba-tiba dan begitu cepat sehingga membuat seseorang tidak sempat lagi berpikir, atau melalui suatu proses yang tidak seketika.

Misalnya antara orang yang balas memukul saat itu juga karena dirinya dipukul terlebih dahulu, dan orang yang memukul dengan direncanakan terlebih dahulu

21.

Rollo May, *Power And Innocence* (New York: W.W. Norton & Company Inc., 1972), h.182

setelah beberapa kali menerima penghinaan sebelumnya. Rollo May²² dalam bukunya *Power And Innocence* membuat pembedaan antara istilah agresi dan kekerasan. Agresi menurutnya berhubungan dengan objek yaitu, kita mengetahui terhadap siapa dan apa kita mengarahkan amarah kita.

Namun dalam kekerasan, relasi dengan objek mengalami disintegrasi. Seseorang menjadi begitu dikuasai oleh hasrat untuk menghancurkan apa saja di sekelilingnya secara liar. Pikirannya menjadi kabur dan persepsinya terhadap musuh tidak jelas.²³ Pada saat itu seseorang telah kehilangan kesadaran akan dunia di sekitarnya, dan hanya ingin melampiaskan desakan yang begitu kuat dari dalam dirinya untuk berbuat kekerasan, termasuk juga menyerang orang yang bahkan ia kasahi.

Dalam karya klasik dari Walter B. Cannon *The Wisdom of The Body*, disebutkan tiga jenis respon organisme terhadap adanya ancaman yaitu : melawan, lari, dan menunda. Contoh, ketika seseorang tiba-tiba menerima dorongan secara kasar dalam suatu antrian di stasiun

22.

Rollo May adalah seorang psikoterapis yang belajar psikoterapeutik di Vienna, menyelesaikan doktor psikologi dan psikoanalitik di New York, mengajar di Princeton dan Harvard, serta penulis beberapa buku psikologi populer yang sukses, salah satunya yang berjudul *Love And Will*.

23.

Rollo May, *Op. Cit.*, h.183

kereta api, maka aliran darahnya segera dibanjiri oleh adrenalin, tekanan darah naik dan detak jantung bertambah cepat yang memberikan tenaga tambahan terhadap otot-otot sebagai persiapan untuk melawan dan menyerang atau lari (ketika muncul perasaan takut dan cemas).

Kemungkinan ketiga yang paling sering ditempuh oleh kebanyakan orang adalah menunda respon. May menilai semakin rendah tingkat pendidikan dan status seseorang, semakin mudah ia bereaksi secara langsung. Sebaliknya, semakin tinggi pendidikan dan status seseorang, semakin ia cenderung untuk menunda reaksinya sampai ia dapat berpikir dengan jelas mengenai kemungkinan yang terbaik untuk melawan atau lari.

Menurut May, inilah salah satu hal yang membentuk kebudayaan manusia, namun juga sekaligus bisa menjadi faktor penyebab gangguan *neurosis*. Seorang pengidap neurotik dapat menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba melawan setiap orang yang baru dikenalnya sebagai substitusi dari tekanan yang tidak berhasil ia atasi pada pengalaman masa kecilnya.²⁴

Setiap situasi memberikan simbol-simbol makna kepada diri setiap orang yang kemudian diinterpretasikan secara pribadi. Misalnya, dorongan pada waktu antrian karcis dapat menjadi stimulus bagi kemarahan, namun

24.

Ibid., h.184

dorongan ketika bermain bersama keluarga tidak menjadi stimulus kemarahan.

Proses pembacaan simbolik terhadap setiap situasi inilah yang disebut interpretasi, dan bagaimana seseorang menginterpretasikan situasi, itulah yang akan menentukan sikap dan intensionalitasnya. Bagaimana seseorang memandang dan menginterpretasikan dunia (yaitu dunia terhadap dirinya) menjadi faktor krusial bagi tindakan kekerasan yang dapat diperbuatnya.

Seorang paranoid yang menembaki orang lain secara membabi-buta dapat disebabkan karena keyakinannya bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki maksud jahat untuk mencelakai dirinya, sehingga ia melakukan itu sebagai pembelaan diri. Jadi, terlepas apakah suatu interpretasi bersifat patologis, ilusif (bersifat khayalan atau menyesatkan), atau objektif, tidaklah banyak mengubah keadaan. Kecuali kita berusaha untuk mencoba masuk ke dalam alam interpretasi simbolik dan melihat dunia sebagaimana seorang paranoid melihatnya. Sebab interpretasi orang itulah yang menentukan apa yang akan ia perbuat.

Hal ini bukan saja berlaku pada tataran individual namun juga dalam relasi dunia Internasional. Bagaimana satu bangsa menginterpretasikan simbol-simbol tertentu dari setiap gerakan dan tindakan bangsa lain

dapat menjadi faktor krusial bagi timbulnya kekerasan dan perang.²⁵

Sebagaimana manusia individual dapat keliru dalam membaca dan memberi interpretasi terhadap suatu keadaan, bangsa-bangsa pun dapat berperilaku sama, memproyeksikan motif-motif bangsa lain secara keliru sebagai tanda ancaman dan perang yang justru dapat merugikan kepentingan mereka, tanpa mereka sendiri sadari.

Hal inilah yang kita saksikan sampai sekarang mengenai ketegangan dan konflik-konflik daerah perbatasan, perebutan pengaruh blok-blok kekuasaan, perlombaan senjata nuklir dan pengembangan bom-bom jenis mematikan lainnya yang tidak lepas dari bagaimana suatu bangsa melihat dan menginterpretasikan dunia terhadap dirinya yang dirasakan sebagai suatu ancaman.

B. Aspek Sosiologis

Kekerasan juga dapat dilihat dalam konteks sosial, artinya kekerasan selalu terjadi dalam relasi interaksi sosial dengan orang lain. Psikolog sosial, John Dewey dalam karyanya *Human Nature and Conduct : An Introduction to Social Psychology* menyebutkan bahwa peran impuls-impuls (dorongan alami, nafsu) dan intelegensi dalam menentukan perilaku manusia hanyalah

25.

Ibid., h.185

bersifat sekunder.²⁶

Dewey beranggapan bahwa perilaku manusia baru bisa dipahami secara konkret jika kita melihatnya sebagai suatu sistem keyakinan-keyakinan (beliefs), keinginan-keinginan (desires), dan maksud-maksud (purposes) yang terbentuk dalam interaksi manusia sebagai makhluk biologis dengan suatu lingkungan sosial. Apa yang dipikirkan dan diputuskan serta bagaimana seseorang bertindak, ditentukan oleh relasi diri dengan lingkungannya yang riil.

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak yang sebelumnya tidak banyak mengenal kekerasan akan menjadi terbiasa dan akrab dengan kekerasan justru setelah ia hidup dan dipengaruhi oleh lingkungannya yang baru (misalnya dalam komunitas gangster) yang kemudian membuatnya menginternalisasi apa yang dinamakan kekerasan.

Selain itu, dimensi sosiologis ini juga berarti bahwa kekerasan selalu membawa dampak pada orang lain, bukan saja secara individu, namun juga kolektif. Baik menyangkut subjek maupun objeknya yang nampak (dapat diamati), kekerasan seringkali berwujud kolektif dan membawa dampak secara luas pada masyarakat.

26.

Limas Sutanto, *Moralitas Yang "Arbitrary"* dalam artikel Suara Pembaruan, 21 Februari 1999, h.4

Penjajahan, anarki dan kerusuhan massa, konflik antar kelompok dan suku, tawuran, sistem pemerintahan yang otoriter, semuanya merupakan contoh-contoh kekerasan yang membawa pengaruh sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu masyarakat yang sedang dan terus berkembang, selalu terjadi apa yang dinamakan perubahan sosial. Perubahan tersebut menyangkut semua transformasi yang mempengaruhi struktur sosial dan perilaku masyarakat.²⁷ Karena masyarakat merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi, maka transformasi struktur dalam suatu bagian dari sistem tersebut dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan dan pertentangan sehingga menimbulkan kekerasan.

Salah satu pendekatan sosiologi yang mencoba memberikan penjelasan mengenai fenomena kekerasan dalam hal ini adalah teori *deprivasi-relatif* (*relative-deprivation theory*). Kekerasan dipandang merupakan hasil dari adanya kesenjangan antara tingginya nilai pengharapan dalam masyarakat dengan ketidakmampuan sistem yang ada untuk memenuhi harapan tersebut.²⁸

27.

Drs. B. Simandjuntak, S.H., Perubahan Sosio Kultural (Bandung: Penerbit Tarsito, 1992), h.5

28.

Thomas R. Dye, Power And Society - And Introduction to the Social Sciences (California: Brooks/Cole Publishing Company), h.315

Dengan kata lain, kekerasan terjadi pada saat harapan-harapan yang ada (bisa apa saja) berjalan lebih cepat dari kondisi-kondisi yang aktual. Kerusuhan rasial misalnya, dapat dipahami dari pendekatan ini sebagai suatu 'kanalisasi destruktif' dari ekspektasi-ekspektasi ras tertentu tentang apa yang seharusnya mereka nikmati dan dapatkan, namun ternyata berada jauh di luar kapasitas dari masyarakat untuk dapat memenuhinya.

C. Aspek Personal & Struktural

Suatu kekerasan disebut personal jika pelakunya atau subjeknya mudah untuk diamati (kasat mata), serta mempunyai sifat yang dinamis (ada fluktuasinya yang jelas). Ini disebut juga sebagai kekerasan langsung.²⁹ Sedangkan kekerasan tidak langsung atau struktural adalah kekerasan yang tidak jelas pelakunya (tidak kasat mata, bekerja secara halus), bersifat statis dan impersonal.

Bentuk yang mudah kita lihat dari kekerasan personal ini adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku (kasat mata) secara perorangan atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, misalnya pengeroyokan dalam suatu peristiwa perkelahian. Sedangkan sistem

29.

I. Marsana Windhu, *Op. Cit.*, h.69

kekuasaan pusat terhadap daerah yang bersifat sentralistik yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan serta eksploitasi sumber-sumber daya secara tidak adil merupakan salah satu bentuk dari kekerasan struktural. Artinya, kekerasan sudah menjadi bagian dari suatu sistem yang buruk,³⁰ sudah melembaga dan terinstitusionalisasi, bahkan 'legitimate' secara hukum.

Mengenai kekerasan personal, kita kembali mengacu pada Johan Galtung yang membagi tipologi kekerasan personal menjadi dua, masing-masing yang terpusat pada anatomi dan satunya terpusat pada fisiologi. Cara-cara yang digunakan bisa mulai dari tubuh manusia itu sendiri sampai dengan memakai segala jenis instrumen dan senjata mutakhir.

Pembedaan antara yang anatomis dan fisiologis terletak pada kenyataan bahwa yang pertama dilihat sebagai usaha untuk menghancurkan tubuh itu sendiri (menghancurkan, merobek, memotong, menembus, membakar).³¹ Sedangkan yang kedua untuk mencegah supaya tubuh itu tidak berfungsi (misalnya meniadakan udara, air, makanan, atau membatasi gerak dengan cara

30.

Galtung menyebutkan beberapa faktor yang membentuk mekanisme kekerasan struktural. Salah satunya adalah adanya korelasi antara kedudukan dan sentralitas yang pada intinya memperbesar ketidakseimbangan, terutama pada distribusi kekuasaan.

31.

Ibid., h.74

merantai/penjara, pencucian otak/"brain-washing").³²

Yang terakhir ini dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, meniadakan masukan (input) seperti air, udara, makanan. Kedua, meniadakan apa yang keluar (output) yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang bersifat jasmani (gerak fisik) dan mental.

Baik kekerasan personal maupun struktural, keduanya dapat membahayakan dan mengancam kehidupan secara utuh (fisik dan non-fisik). Perbedaannya terletak pada sifat (karakteristik), cara, serta bentuk (wujud) masing-masing. Tetapi dilihat dari segi akibat, keduanya sama dan tidak ada alasan bagi kita untuk beranggapan bahwa kekerasan struktural kurang menimbulkan penderitaan dari kekerasan personal atau pun sebaliknya.

D. Aspek Destruktif & Konstruktif

Secara umum, setiap bentuk kekerasan adalah destruktif. Apa yang dihasilkan oleh kekerasan pada dasarnya selalu membawa kerusakan dan penderitaan, khususnya pada pihak yang menjadi objek. Pada saat kekerasan terjadi, seringkali hal tersebut mengambil tempat di dalam wilayah 'sub-rasional' seperti pada kerusuhan rasial atau etnik. Atau berada dalam kategori 'non-rasional' seperti yang terjadi pada kekerasan

32.

Loc. Cit.

struktural. Artinya Pertimbangan rasio tidak lagi menjadi unsur yang memberi komando bagi tindakan yang dilakukan.

Ketika akal sehat tidak lagi memegang kendali (dalam kenyataannya seringkali demikian), maka kekerasan memanasifasikan wujudnya secara destruktif. Sifat menghancurkan telah menjadi tujuan pada dirinya sendiri dan tidak lagi melihat pada situasi maupun konsekuensinya. Pada keadaan ini, kekerasan telah menjadi "penguasa" dan pelakunya berada dalam penguasaannya.

Meskipun demikian, kekerasan juga dapat dilihat dari penilaian reflektif terhadap akibat-akibat yang ditimbulkannya. Jika kita berasumsi bahwa kematian merupakan salah satu bentuk dari kekerasan, dan kematian selalu diperhadapkan kepada manusia sebagai suatu kemungkinan, maka kemungkinan itulah yang sesungguhnya memberikan arti dan makna bagi manusia untuk menjalani hidup dan saling mencintai.

Sejarah kekerasan yang sering disebut sebagai 'tragedi' dapat membawa manusia kepada level pengalaman yang lebih dalam untuk membuatnya lebih bijaksana. Sebagaimana ungkapan Shakespeare bahwa makna kehidupan harus dicari dalam tragedi ketimbang dalam komedi.³³

33.

Rollo May, *Op. Cit.*, h.171

Dalam analisisnya mengenai hal ini, Rollo May menyebutkan tulisan karya Franz Fanon³⁴ yang menurutnya memberikan penjelasan tentang prototipe dari kekerasan konstruktif. Fanon menulis tentang orang-orang di Afrika (juga di Amerika Latin, Cina, India) yang hidup dalam keadaan 'substandard' tanpa memiliki kesadaran akan nilai dan martabat diri mereka sebagai manusia karena terus menerus mengalami penindasan struktural (politik) yang berwujud kolonialisme dan rezim totaliter.

Bagi orang-orang demikian, kekerasan dianggap dapat mengangkat mereka dari keadaan terkebelakang (*undeveloped persons*) ke tingkat yang manusiawi (*human level*). Hal ini dapat mengambil bentuk dalam suatu pembangkangan politik atau revolusi rakyat sebagai terobosan sikap apatis dan pasrah guna mewujudkan suatu reformasi sosial.

Kekerasan dilihat sebagai jalan untuk menegakkan integritas diri, perjuangan untuk menegakkan penghargaan terhadap nilai dan martabat manusia, perjuangan terhadap lahirnya dan tumbuhnya kesadaran akan kebebasan asasi serta penghormatan terhadap nilai-nilai kesetaraan.

34.

Franz Fanon adalah seorang psikiatris kulit hitam yang belajar di Paris, kemudian pergi ke Algeria dan ikut berpartisipasi dalam revolusi Algeria melawan kolonialisme Perancis. Bukunya *The Wretched of the Earth* membuat ia menjadi seorang teoritikus, bukan hanya terbatas bagi revolusi Algeria namun juga bagi semua orang kulit hitam di Afrika.

Jadi nilai konstruktif di sini dilihat dari perspektif keadilan jangka panjang, dan pilihan terhadap kekerasan dipahami sebagai sesuatu yang realistis. Kekerasan yang dimaksud di sini bukanlah kekerasan yang tanpa sasaran atau membabi buta, melainkan ditujukan secara langsung terhadap kejahatan yang riil dari suatu sistem sosial yang menindas kemanusiaan manusia secara lalim.

1.3. Motif-Motif Penggunaan Kekerasan (Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebabnya)

A. Berhubungan Dengan Kekuasaan-Kepentingan Politik

Menurut Antonio Gramsci (intelektual Italia yang pertama kali memperkenalkan konsep tentang hegemoni kekuasaan), kekuasaan (politik) yang langgeng membutuhkan dua perangkat kerja. Yang pertama berupa tindakan kekerasan yang bersifat memaksa, dan yang kedua bersifat lunak, membujuk.³⁵

Perangkat keras yang memaksa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga seperti militer, polisi, penjara, Undang-Undang. Sedangkan perangkat yang lunak dan membujuk dijalankan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat

35.

Ariel Heryanto, "Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci" dalam *Politik Kekerasan Orba* (Bandung: Mizan, 1999, Cet. ke-1., 1999, Editor: Sukandi A.K.), h.27

sipil seperti agama, pendidikan, kesenian. Baik perangkat yang keras maupun yang lunak, keduanya merupakan alat-alat kekerasan yang dipakai dalam rangka melanggengkan kekuasaan politik.

Pendapat Gramsci di atas dapat kita pahami berdasarkan kenyataan bahwa kekuasaan (bukan hanya politik) mempunyai kecenderungan naluriah untuk melanggengkan diri. Dalam kerangka tersebut, pada saat terjadi konflik kepentingan, maka logika kekuasaan akan selalu berusaha untuk memenangkan kepentingan penguasa dengan segala macam cara, termasuk dengan bayaran darah dan kekerasan.³⁶

Dari sejarah kita dapat menyaksikan contoh-contoh yang melimpah tentang hal ini. Mulai dari jaman kerajaan kuno seperti Romawi sampai pada era pemerintahan negara-negara modern, kekerasan selalu digunakan sebagai alat untuk melayani kepentingan-kepentingan politik. Republik Indonesia merupakan hasil dari sejarah kolonial Hindia Belanda yang penuh kekerasan. Orde Baru didirikan di atas pertumpahan darah secara mengerikan antara tahun 1965-1966. Konflik berdarah di Timor Timur juga tidak dapat dilepaskan dari konflik kepentingan politik antara Indonesia dan Portugal.

36.

Mudji Sutrisno, *Logika Kekuasaan: Akar Logika Kekerasan*, *Ibid.*, h.42

Selain itu, kekerasan politik juga seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perubahan politik. Menurut Huntington, proses demokratisasi gelombang ketiga (1974-1990) juga diwarnai oleh kekerasan politik.³⁷ Sebagian kecil terjadi kekerasan secara ekstensif (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cile, Afrika Selatan), sebagian besar yang lain terjadi dalam tingkat yang rendah (Portugal, Spanyol, Yunani).³⁸

Dalam konteks domestik, kita dengan sangat jelas dan terang dapat menyaksikan deretan panjang kekerasan brutal dan biadab yang bermuatan politik terjadi belakangan ini (1998-1999). Mulai dari tragedi Trisakti, kerusuhan Mei, peristiwa Banyuwangi, Ketapang, Ambon, dan banyak lagi. Dari kenyataan sejarah dapat disimpulkan bahwa antara politik dan kekerasan terdapat suatu kecenderungan korelasi yang sangat erat dan sukar untuk dipisahkan.

B. Berhubungan Dengan Penguasaan & Kepentingan Ekonomi

Filsuf Perancis, Jean Jacques Rousseau menyebutkan bahwa kekerasan dalam masyarakat manusia

37.

A. Boedisantoso R., "*Membangun Integrasi Bangsa*" dalam *Suara Pembaruan 27 Mei 1999*, h.4

38.

Loc. Cit.

lahir pertama kali karena disebabkan oleh motif-motif ekonomi. Dalam keadaannya yang alamiah, manusia dianggap tidaklah bersifat 'violent'.

Namun ketika terjadi kejadian-kejadian alam yang tidak bersahabat seperti tahun yang gersang, musim dingin yang sangat panjang, banjir, dan lain-lain, maka manusia dipaksa untuk saling berhubungan dan bekerja sama.³⁹ Misalnya untuk bersama-sama berburu atau menangkap ikan. Keadaan ini lama-kelamaan menimbulkan persoalan karena terjadi perselisihan dan pertentangan mengenai hak-hak kepemilikan. Dari situlah akhirnya muncul apa yang dinamakan kekerasan, terutama karena dipicu oleh faktor-faktor ekonomis.

Terlepas dari pandangan positif Rousseau mengenai sifat alamiah manusia yang asali, asumsinya tentang lahirnya kekerasan karena motif kepentingan ekonomis dapat kita pahami sepenuhnya. Dalam perkembangan peradaban kemudian dimana hubungan-hubungan serta variabel ekonomi menjadi semakin kompleks, munculnya kekerasan dapat dipandang sejalan dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar individu, kelompok, bahkan negara yang dihubungkan dengan ketersediaan sumber-sumber alam yang terbatas.

39.

Harun Hadiwijono, *Op. Cit.*, h.60

Dalam sistem masyarakat kapitalis, nilai dan kerja manusia seringkali hanya dihargai dan dianggap setara dengan materi uang sebagai nilai tukar. Kemanusiaan manusia direduksi sebagai barang komoditas dan buruh manusia disamakan dengan alat kerja.⁴⁰

Filsafat materialistik dan hedonistik yang dianut banyak manusia modern dewasa ini yang mengukur kebahagiaan sebanding dengan banyaknya jumlah kapital yang dimiliki, seringkali mendorong manusia untuk berbuat kekerasan sebagai alternatif pencapaian tujuan ketika cara-cara lain dianggap kurang efektif.

Mulai dari contoh-contoh kekerasan ekstrem revolusi kaum proletar dalam Marxisme, kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan diskriminasi akses dan eksploitasi sumber daya ekonomi secara tidak adil yang bersifat struktural. Perang antar negara karena perebutan mengenai lahan sumber daya alam, konflik kekerasan antar kelompok dan individu karena persaingan dagang, sampai pencurian dan perampokan, semuanya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan ekonomis yang melatarbelakanginya.

40.

Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, h.41

C. Berhubungan Dengan Keyakinan Religius/Kepercayaan Agama

Tindak kekerasan yang mempunyai sangkut paut dengan perasaan dan fanatisme keagamaan dapat dikatakan telah berumur sama tuanya dengan kehadiran manusia itu sendiri di muka Bumi. Cerita pembunuhan Kain atas Habel dilatarbelakangi oleh rasa dengki dan iri dalam konteks religius.

Perang dan konflik yang bermotifkan dan mengatasnamakan agama telah terjadi dalam sejarah secara berulang-ulang. Perang salib, inkuisisi-inkuisisi gereja, perang Arab-Israel, Konflik Islam-Kristen di Libanon, Protestan-Katolik di Irlandia, orang-orang Karen dan Araken di Birma, orang Moro di Filipina, barulah sebagian dari deretan panjang konflik-konflik kekerasan berlatar agama/ kepercayaan.

Dari sejarah bangsa Yahudi, pemberontakan Makabeus terhadap Antiokhus Epiphanes IV terjadi karena adanya penindasan dalam bidang agama di daerah Yudea terhadap orang-orang Yahudi. Dalam I Makabe 1:47 dan II Makabe 6:21 diceritakan bahwa orang-orang Yudea dipaksa untuk mempersembahkan korban babi kepada Yahweh dengan tujuan untuk menodai ciri khas agama Yahudi.⁴¹

41.

Prof. Dr. H. Jagersma, *Dari Aleksander Agung Sampai Bar Kokhba* (Jakarta: BPK-GM, 1991), h.70-71

Meskipun tindakan pemaksaan tersebut dilandasi oleh maksud-maksud politis dari Antiokhus IV, namun meletusnya pemberontakan terutama disebabkan karena perasaan keagamaan yang paling dalam telah dirasakan demikian terinjak-injak dan dilukai.

Penulis sejarah Romawi, Suetonius, menuliskan tentang serentetan kerusuhan pada tahun 49 M yang terjadi di kota Roma yang menyebabkan kaisar Klaudius mengusir penduduk Yahudi dari kota itu. Menurutnya, sumber kekacauan itu adalah seorang yang disebutnya "Chrestus".⁴² Meskipun para ahli telah memperdebatkan identitas orang ini, hampir dapat dipastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang direkam Suetonius itu disebabkan oleh pertikaian mengenai pengajaran orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Yesus yang disebut juga Kristus.⁴³

Dalam bagian analisisnya mengenai relasi agama, politik, dan kekerasan, Max Weber menerangkan apa yang diamatinya terhadap Islam,

As in Islam, religion makes obligatory the violent propagandizing of a true prophecy which consciously eschews universal conversion and enjoins the subjugation of unbelievers under the dominion of a

42.

John Drane, *Memahami Perjanjian Baru* (Jakarta: BPK-GM, 1996), h.20-21

43.

Loc. Cit.

ruling class dedicated to the religious war as one of the basic postulates of its faith⁴⁴

Hal yang mirip menurut Weber juga terdapat pada Calvinisme radikal yang berpandangan bahwa merupakan kehendak Allah bagi gereja untuk mengontrol dan mendominasi dunia yang berdosa ini (dalam segala aspeknya termasuk juga kekuasaan politik).⁴⁵

Dari analisis sosio-psikologis, kehidupan beragama yang dijalani dengan serius akan membawa manusia ke dalam suatu pengalaman transendental.⁴⁶ Pengalaman tersebut kemudian berpotensi membawa manusia sampai pada sikap yang disebut fanatisme agama dan sentimen agama (agamanya yang paling benar, merasa wajib membela agamanya seraya memandang agama lain sebagai ancaman).

Selanjutnya, kedua sikap ini dapat mendorong penganut agama berpikir, bersikap dan bertindak tidak adil, bahkan seringkali tidak berperikemanusiaan.⁴⁷ Maka lahirlah tindak kekerasan seperti pengrusakan,

44.

Max Weber, *The Sociology of Religion* (Boston: Beacon Press, Cet. ke-5, 1969), h.227

45.

Loc. Cit.

46.

Broto Semedi Wiryotenoyo, "Ketidakadilan, Kemiskinan dan Agama" dalam *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1996, Editor: Yohanes Mardimin), h.66-67

47.

Loc. Cit.

pembakaran, penghancuran, penindasan, sampai pada pembunuhan. Semuanya dilakukan atas dasar dan motif agama.

Sepanjang keberadaan agama di dunia, relasi dialektis antara agama dan politik seringkali menimbulkan ketegangan antara keduanya. Ketika agama dipolitisir, dimana politik ingin memasukkan logikanya ke dalam agama dengan menghalalkan segala cara termasuk mengobrak-abrik kerukunan antar agama,⁴⁸ maka kerap kali yang muncul adalah kekerasan dengan wajah agama.

Di sisi lain, pada saat agama terlalu bernafsu dan berambisi untuk masuk dalam kekuasaan, maka hal itu juga dapat memunculkan kekerasan baru dalam bentuk-bentuk kekuasaan yang dilegitimasi secara manipulatif dengan mengatasnamakan otoritas Allah. Dalam kerangka ini, teologi tertentu dapat diciptakan dan digunakan sebagai alat rekayasa untuk merasionalisasikan sekaligus mengesahkan tindakan-tindakan kekerasan berdasarkan wahyu ilahi. Contoh-contoh dari hal ini terdapat sepanjang perjalanan dan perkembangan sejarah agama-agama di dunia sampai hari ini.

48.

Salman Habeahan, S.Ag., "Kekerasan di Balik Wajah Buram Agama" dalam Majalah Narwastu edisi Juli 1999, h.8

D. Berhubungan Dengan Perbedaan Ras/Etnik/Suku

Kekerasan yang berkaitan dengan rasial biasanya mempunyai kaitan dengan berbagai faktor lain seperti politik, sejarah, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam periode kolonisasi dan imperialisasi, para penguasa dan pemerintah sering menjadikan tawanan sebagai budak dan mensahkan tindakan tersebut berdasarkan kedudukan korban yang rendah dan tidak berdaya.

Sejak itu, mitos ras dan "pseudo-ilmu pengetahuan" terus dipergunakan untuk mempertahankan ideologi rasial demi keuntungan golongan tertentu. Berbagai buku dan teori telah ditulis untuk mengesahkan perbudakan rasial. Antara lain teori penciptaan berjenjang (spesies yang lain dari genus yang sama), teori inferioritas mental (orang negro sebagai pribadi yang tidak kenal tanggung jawab dan memiliki ketergantungan total kepada tuannya).⁴⁹ Juga Argumen sosial-ekonomi (di koloni-koloni tidak ada sumber tenaga kerja untuk pengadaan bahan mentah yang diperlukan bagi revolusi industri di Eropa).

Kekerasan rasial dalam sejarah juga terjadi karena adanya suatu "ilusi-superioritas" dari para elite

49.

John Stott, *Isu-Isu Global* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, Cet. ke-3, 1996), h.277-278

politik suatu bangsa. Anti-Semitisme di Jerman dan politik Apartheid di Afrika Selatan didasari oleh keyakinan yang identik bahwa mereka "ditakdirkan untuk berkuasa" dan karena itu harus mempertahankan kemurnian ras mereka.

Dalam satu seminar yang dilangsungkan oleh Pusat Hak-Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa dalam program aksi untuk dasawarsa kedua untuk memerangi rasisme dan diskriminasi rasial (1983-1993), para peserta mengemukakan mengenai dua paradoks : "bahwa rasisme sebenarnya telah meningkat begitu demokrasi telah meluas, dan bahwa rasisme telah tumbuh begitu ilmu pengetahuan berkembang".⁵⁰

Dalam seminar itu pula disebutkan bahwa diskriminasi sering muncul dalam periode kesulitan ekonomi. Dihubungkan dengan Indonesia, krisis moneter yang kemudian ditunggangi oleh rekayasa politik yang brutal dan sangat kejam dari rezim Orde Baru telah meletuskan kerusuhan bernuansa rasial (anti-Cina) yang

50.

Catatan untuk Pembicara (Notes for Speakers)
Mengenai Hak Asasi Manusia (New York: Departement
Penerangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa - tanpa
keterangan tahun), h.44

sangat tragis dan mengerikan pada 12-14 Mei 1998.⁵¹

Sebab itu tidaklah salah bila rasisme disebut sebagai "monster berkepala banyak"⁵² karena ia merupakan alat kekerasan yang bisa dipergunakan oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya. Sebab itu konflik rasial, etnis atau suku seringkali merupakan hasil campuran dari berbagai faktor yang bermain di dalamnya.

Kebencian rasial yang kemudian dapat meledak dalam kerusuhan rasial (atau perang suku seperti antara Dayak-Madura di Kalimantan) dapat merupakan hasil akumulasi dari konflik budaya/adat, proses internalisasi dan doktrinasi pendidikan secara formal dan informal (di rumah & sekolah), kecemburuan sosial karena kesenjangan ekonomi, dan variabel-variabel lainnya. Akibatnya, diskriminasi rasial (yang di dalamnya juga terdapat

51.

Konflik rasial di Indonesia juga terjadi dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan besar yang didominasi oleh keturunan Cina dilindungi oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Mereka bekerja sama sebagai *partner*. Pengusaha memberikan uang dan para pejabat memberikan jaminan perlindungan keamanan dan politik. Agar orang-orang Cina selalu membutuhkan perlindungan pemerintah, maka sejenis sentimen anti-Cina senantiasa dihidupkan. Kebijakan ini dilaksanakan selama masa kolonial dan oleh rezim Orde Baru ternyata dipakai lagi. Untuk selengkapnya Lihat tulisan Arief Budiman, "Gerakan Sosial dan Demokrasi di Indonesia" dalam *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, *Op. Cit.*, h.84-85

52.

Catatan Untuk Pembicara Mengenai HAM, *Ibid.*

kekerasan) dapat mencakup dan merembes ke semua area dan sektor kehidupan. Mulai pada tingkat individu, masyarakat, institusi birokrasi, elite pemerintahan, sampai pada peraturan perundang-undangan.⁵³

D. Berhubungan Dengan Masalah-Masalah Psikologis

Setiap manusia selalu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dalam dirinya. Bila muncul suatu kebutuhan dan ada dorongan (drive) untuk bertindak, namun karena suatu sebab kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dan dorongan untuk bertindak terhambat (dihalangi/diblok), maka dalam psikologi timbul situasi yang disebut *frustrasi*.⁵⁴ Hambatan ini bisa berupa apa saja, baik bersifat fisik maupun emosional, dari dalam atau dari luar diri individu.

Salah satu kemungkinan reaksi individu yang dapat terjadi dalam menghadapi frustrasi adalah munculnya tindakan agresif berupa kekerasan sebagai manifestasi energi yang sudah disiapkan sebelumnya untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan. Penjelasan teori *Frustrasi-Agresi* mungkin dapat dianggap yang paling

53.

Untuk pembahasan dari perspektif Kristen mengenai problem dan tantangan rasisme bagi orang kulit putih Amerika, lih. Joseph Barndt, *Dismantling Racism* (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1991).

54.

Drs. Irwanto et. al., *Psikologi Umum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.211

populer untuk menerangkan kekerasan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Teori ini beranggapan bahwa agresi selalu merupakan hasil dari frustrasi. Begitu juga sebaliknya, frustrasi selalu menuju pada suatu bentuk dari agresi. Ketika hasrat dan keinginan seseorang diblok dan timbul rasa frustrasi, individu akan berusaha mengurangi kegelisahan emosionalnya dengan cara tertentu. Agresi membantu untuk mengurangi frustrasi akibat terhalangnya pemenuhan kebutuhan, namun agresi gagal untuk memuaskan kebutuhan itu sendiri.⁵⁵ Derajat dari frustrasi dipengaruhi oleh berapa kuatnya intensitas kebutuhan dan oleh derajat ekspektasi terhadap keberhasilan untuk memperolehnya.⁵⁶ Semakin besar derajat suatu frustrasi, semakin besar pula potensinya untuk menghasilkan tindakan kekerasan yang semakin dasyat.

E. Berhubungan dengan pembelaan diri (self-defense)

Kekerasan tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya agresif dan ofensif ke luar, tetapi juga bisa timbul sebagai perilaku defensif dalam rangka mempertahankan diri (pembelaan diri) terhadap sesuatu yang diidentifikasi sebagai ancaman. Hal ini bisa

55.

Thomas R. Dye, *Op. Cit.*, h.315-316

56.

Ibid., h.316

terjadi secara individual, kelompok, sampai pada ruang lingkup bangsa (negara).

Memang dalam kenyataannya dapat menyulitkan bagi kita untuk memilah dengan tegas mana yang sifatnya ofensif dan defensif. Sebab dalam rangka bertahan, sering kali yang dilakukan adalah tindakan yang ofensif dan agresif. Namun bagian ini hanya ingin memberikan suatu pemahaman bahwa tindak kekerasan dapat dipicu oleh banyak hal, termasuk salah satunya yaitu motif pembelaan dan pertahanan diri.

Contoh yang klasik, seorang polisi terpaksa melepaskan tembakan ke arah penjahat yang menyerangnya dengan senjata tajam. Atau ketika satu resimen tentara penjaga perbatasan melepaskan tembakan ke arah sekelompok pasukan bersenjata lain yang mencoba menerobos garis perbatasan, dan contoh-contoh lainnya. Bagian ini akan dibahas secara khusus pada bab-bab berikutnya.

1.4. Relasi Antara Kekuasaan Dengan Kekerasan

Pendapat yang mengaitkan kekuasaan dengan kekerasan cenderung diterima secara umum.⁵⁷ Logika kekuasaan dengan naluri purbanya yang selalu berusaha untuk melestarikan dan memenangkan kepentingan penguasa

57.

Lih. Sukandi A.K dalam Politik Kekerasan Orba, Op. Cit., h.27

dengan sendirinya telah menjadi akar bagi logika kekerasan. Kekerasan adalah wujud paksaan dari yang lebih berkuasa kepada yang dikuasai.⁵⁸

Selain itu, kekerasan juga dapat dilihat sebagai jenis khusus kekuasaan yang menghancurkan orang lain atau barang lain, atau kedua-duanya.⁵⁹ Dengan kata lain, kekerasan merupakan instrumen kekuasaan. Kekerasan juga dapat kita pandang sebagai manifestasi yang paling mencolok (terang-terangan) dari kekuasaan. Ada juga yang melihat dari sisi sebaliknya, yaitu mendefinisikan kekuasaan sebagai sejenis kekerasan yang lunak (ringan).⁶⁰

Hannah Arendt dalam *On Violence*⁶¹ memberikan pembahasan yang menarik mengenai pengertian istilah-istilah yang berhubungan dengan kekuasaan yaitu : *power*, *strength*, *force*, dan *violence*. Kekuasaan (*power*), dipandang berhubungan dengan kemampuan manusia, bukan hanya untuk sekedar bertindak tetapi bertindak secara terencana dan dilaksanakan secara kolektif (bersama-sama).

58.

Jakob Sumardjo "*Kekuasaan dan Kekerasan*", *Ibid.*, h.37

59.

I. Marsana Windhu, *Op. Cit.*, h.67

60.

Hannah Arendt, *On Violence* (New York: Brace & World Inc., 1970), h.38

61.

Ibid., h.44-46

Menurut Arendt, kekuasaan tidak pernah merupakan milik perorangan tetapi selalu merupakan milik sekelompok orang atau grup. Selama kelompok itu bersama-sama (tidak pecah), kekuasaan akan tetap ada. Ketika kita menyebut seseorang "berkuasa", sebenarnya kita sedang menunjuk pada sejumlah orang di belakang orang tersebut yang memberikan dukungan kepadanya untuk berkuasa dan bertindak atas nama mereka. Ketika dukungan tersebut dicabut, maka seketika itu juga kuasanya lenyap.

Tenaga (strength), menunjuk pada sesuatu yang dimiliki secara inheren/melekat pada individu atau objek tertentu (misalnya mesin traktor) dan secara esensial bersifat independen (tidak bergantung pada orang lain). Kekuatan (force), menunjuk pada sejumlah energi yang dilepaskan oleh tindakan fisik (misalnya kekuatan alam) atau dalam suatu gerakan sosial.

Yang terakhir, kekerasan (violence) lebih dilihat secara distinktif pada karakteristik instrumental yang dimilikinya. Kekerasan dipandang sebagai alat untuk melipatgandakan tenaga (strength) guna tujuan-tujuan tertentu sampai pada tahap dimana kekerasan dapat disubstitusikan oleh yang lain (misalnya oleh negosiasi atau jalan perundingan).

RANGKUMAN

Dari pembahasan sepanjang Bab II dapat disimpulkan bahwa kekerasan tidak cukup untuk dipahami hanya dari satu sisi sudut pandang tertentu secara terbatas. Hobbes melihatnya sebagai satu ciri dari sifat alamiah manusia yang buruk dalam kerangka pengesahan bagi absolutisme kekuasaan negara secara hukum. Machiavelli memandangnya sebagai instrumen strategis dalam mengabdikan dan melayani kepentingan penguasa.

Karl Marx lebih menyorotinya dari aspek relasi-relasi ekonomi yang bersifat eksploitatif dan manipulatif sehingga menimbulkan konflik-konflik antar kelas berdasarkan kepentingan ekonomi. Freud melihatnya dari sisi struktur kepribadian diri manusia secara alamiah yang berkembang dan mengalami proses interaksi secara dinamis dengan lingkungan. Dari situ kemudian dapat timbul kekerasan sebagai bagian normal dari hidup manusia.

Sedangkan Galtung lebih memfokuskan perhatiannya pada segi akibat dan dampak yang dialami oleh objek seraya mengartikannya sebagai relasi asimetris antara tingkat yang lebih rendah dari apa yang aktual dengan tingkat yang lebih tinggi dari apa yang potensial. Dengan demikian tulisan Galtung tentang kekerasan dapat dianggap mempunyai cakupan dimensi yang lebih luas dan definitif dibandingkan dengan yang lainnya. Namun

perbedaan tekanan dari tiap-tiap pandangan hendaknya dilihat sebagai komplementasi satu terhadap yang lain guna mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai kekerasan dan penggunaannya.

Sebagai suatu gejala yang dapat diamati dan dirasakan, kekerasan dapat dipolarisasikan dalam beberapa aspek. Aspek psikoneurologis menunjukkan bahwa kekerasan mempunyai dasar psikologis dalam proses interpretasi simbol-simbol secara internal terhadap segala sesuatu yang ditangkap oleh indera dari luar sebelum dimanifestasikan keluar secara fisik.

Aspek sosiologis memperlihatkan pengaruh kausalitas dan interaksi timbal balik antara kekerasan dengan lingkungan sosial yang berdampak bukan saja secara individu namun terutama secara kolektif. Aspek personal dan struktural memperlihatkan bahwa kekerasan tidak selalu mempunyai subjek yang jelas dan mudah dilacak, namun seringkali sudah menyatu dengan suatu sistem (bisa apa saja) yang impersonal dan sangat sulit untuk diubah.

Aspek destruktif dan konstruktif memperlihatkan bahwa kekerasan secara umum mempunyai akibat langsung yang merusak dan menghancurkan serta membawa penderitaan. Namun secara khusus hal tersebut tidak selalu demikian dan dapat juga dinilai positif berdasarkan dampak-dampak yang dihasilkannya secara jangka panjang.

Penggunaan kekerasan dapat mempunyai motif yang sangat beragam dan mengambil bentuk serta mewujud secara bervariasi dalam setiap bidang dari realita kehidupan. Ia bisa terjadi di lapangan politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kekerasan juga dapat muncul berkaitan dengan sentimen-sentimen primordial seperti etnis, ras, agama, atau sebagai upaya defensif dalam mempertahankan diri dari ancaman eksternal.

Yang penting untuk digarisbawahi adalah adanya relasi yang sangat kuat antara kekerasan dengan kekuasaan. Meskipun hal ini tidak mutlak harus dinilai secara negatif, namun dengan karakteristiknya yang khas, kekerasan seringkali dijadikan sebagai instrumen penghancur dan budak dari kekuasaan yang korup yang dapat terjadi di semua bidang dan institusi kemasyarakatan, baik dalam skala kecil maupun besar.
